

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Absori, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.
- A.Daim, *Hukum Administrasi*, Lakbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Bagir Manan dalam Kata Pengantar buku Taufiqukohman, *Optimalisasi Peningkatan Investigasi Ombudsman Republik Indonesia Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2015.
- Daim A, Nuryanto, *Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, Lakbang Justitia 2018.
- Department For Work and Pension, Financial Redress for Maladministration, dikutip dari A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik, Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. (Bandung, Alfabeta.), 2016.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Joko Widodo, *Good Governance*, Surabaya, Insan Cendikia, 2001.
- M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, FBIS Publishing, Karawang, 2018.
- Nina Pane, Adnan Buyung Nasution, *Nasihat Untuk SBY*, Jakarta, Kompas, 2012.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Buku Ajaran), Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014.

- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Perss, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan HR dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta, UII Press, 2018.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sujanto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Sunaryati Hartono dalam makalahnya “*Ombudsman Sebagai Lembaga Penegak Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia*”, Makalah disampaikan di Seminar tentang: Fungsi Ombudsman dalam Negara Demokrasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 23-24 Agustus, 1999.
- Sunaryati Hartono, *Panduan Investigasi untuk Indonesia*, Jakarta, The Asia Foundation Indonesia, 2003.
- Syamsuddin Rahman, Aris Ismail. *Mengenal Hukum Di Indonesia*, Andi Bau Utari Makassar, 2014.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 *Tentang Ombudsman Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Tentang Administrasi Pemerintahan*

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 *Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan*

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 *tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 *Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup*

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 *Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 *tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

### C. JURNAL

Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komuniasi. Volume VI No. 1, 2016.

Arif Cahyadi, *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, Vol-2, *Jurnal Ilmiah Hukum*

Adam Setiawan , *Pelaksanaan fungsi rekomendasi ombudsman republik indonesia kepada kepala daerah* , *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020.

Adhar Hakim, “*Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 7, 2015.

*Jurnal Fisip Universitas Airlangga*, Clearesta Mahardika, *Optimalisasi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur Terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2014.

Galang Asmara, *Peranan Ombudsman Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, *Jurnal Perspektif*, Volume VII, Nomor. 2, April 2002.

Dinny Wirawan Pratiwie, *Urgensi Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2012.

#### D. SUMBER LAINNYA

<https://antikorupsi.org/id/news/rekomendasi-ombudsman-ri>

<http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2702/1861>

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>

<https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/11428>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenai-maladministrasi>

<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>